



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 7-9 NOVEMBER 2019**

*
**

**
*

JAKARTA 2019



**Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait dengan
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Sumatera Selatan**

7-9 November 2019

=====

1. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d. : Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4 : Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

C. SUSUNAN TIM

Pada Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 kali ini, Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang ikut Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka merumuskan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di provinsi Sumatera Selatan, diantaranya:

No	Nama	Fraksi
1	Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PNASDEM
2	Drs. I MADE URIP, M.Si	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
3	Ir. MINDO SIANIPAR	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4	RIEZKY APRILIA, SH., MH	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5	ALIEN MUS, S.H	ANGGOTA/F-PG
6	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, MM	ANGGOTA/F-PGERINDRA
7	Ir. SUMAIL ABDULLAH	ANGGOTA/F-PGERINDRA
8	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si	ANGGOTA/F.NASDEM
9	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn	ANGGOTA/F.PKB
10	MUSLIM, S.HI., MM	ANGGOTA/F.PDEMOKRAT
11	Dr. HERMANTO, S.E., MM	ANGGOTA/F-PKS
12	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., MM	ANGGOTA/F-PKS
13	HAERUDIN, S.Ag., MH	ANGGOTA/F-PAN

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI untuk:

1. Melihat secara langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui program dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mencari alternatif kegiatan/program pencegahan dan pengendalian kebakaran yang efektif, efisien dan optimal dalam rangkaantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun hampir seluruh wilayah di Indonesia.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019. Lokasi kunjungan yang dituju antara lain:

1. Kantor Gubernur, pertemuan dilakukan bersama dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Wakil Gubernur, Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, serta Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) membahas permasalahan serta aspirasi Daerah terkait dengan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Peninjauan contoh lahan gambut yang dikelola oleh Pemerintah di sekitar jalan Tol menuju Indralaya
3. Peninjauan lokasi kebakaran lahan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir
4. Pertemuan dengan satgas Gakkum dan masyarakat di Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir.

F. PERMASALAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN NASIONAL

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang

ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lain dari karhutla adalah:

- tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim;
- hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir; dan
- sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 luas kawasan hutan dan lahan terbakar yang tersebar di 6 provinsi mencapai lebih dari 857.000 hektar, dan merupakan bencana karhutla terbesar dalam 3 (tiga) tahun terakhir (berdasarkan data, luas karhutla pada 2018 adalah seluas 510.000 hektar, sedangkan pada 2016 adalah seluas 438.000 hektar).

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kejadian karhutla sejak Januari hingga September 2019 seluas 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar serta lahan gambut 227.304 hektar. 6 (enam) provinsi dengan jumlah karhutla tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 134.227 hektar, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) seluas 127.462 hektar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) seluas 113.454 hektar, Provinsi Riau seluas 75.871 hektar, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 52.716 hektar dan Provinsi Jambi seluas 39.638 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kondisi alam dan akibat aktivitas manusia, dimana berdasarkan beberapa

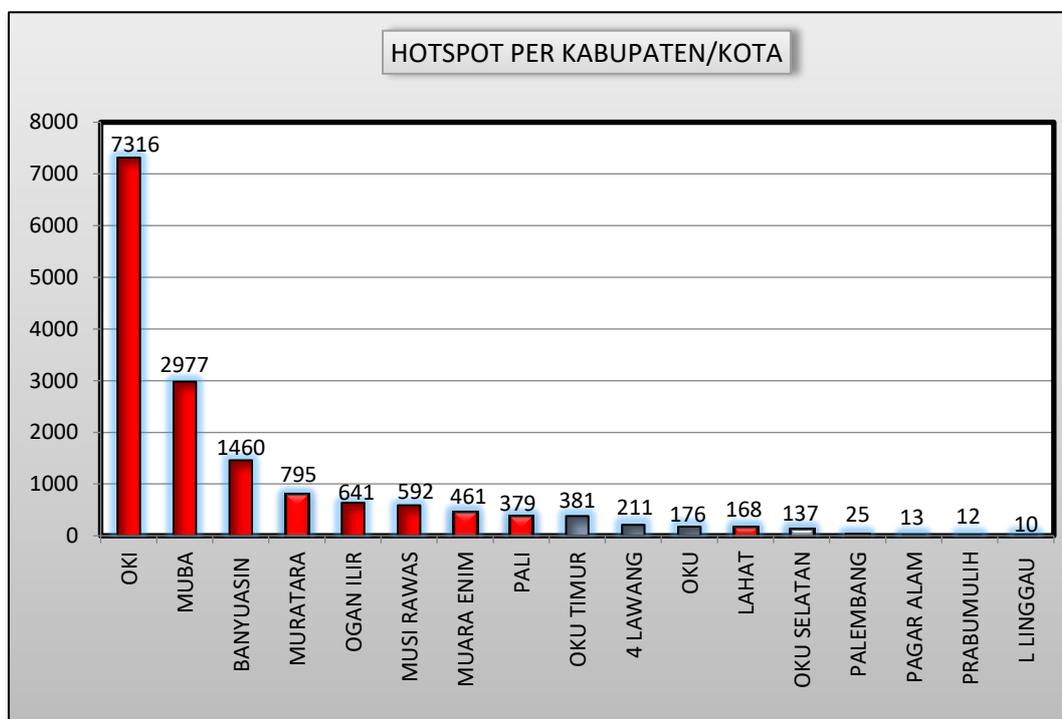
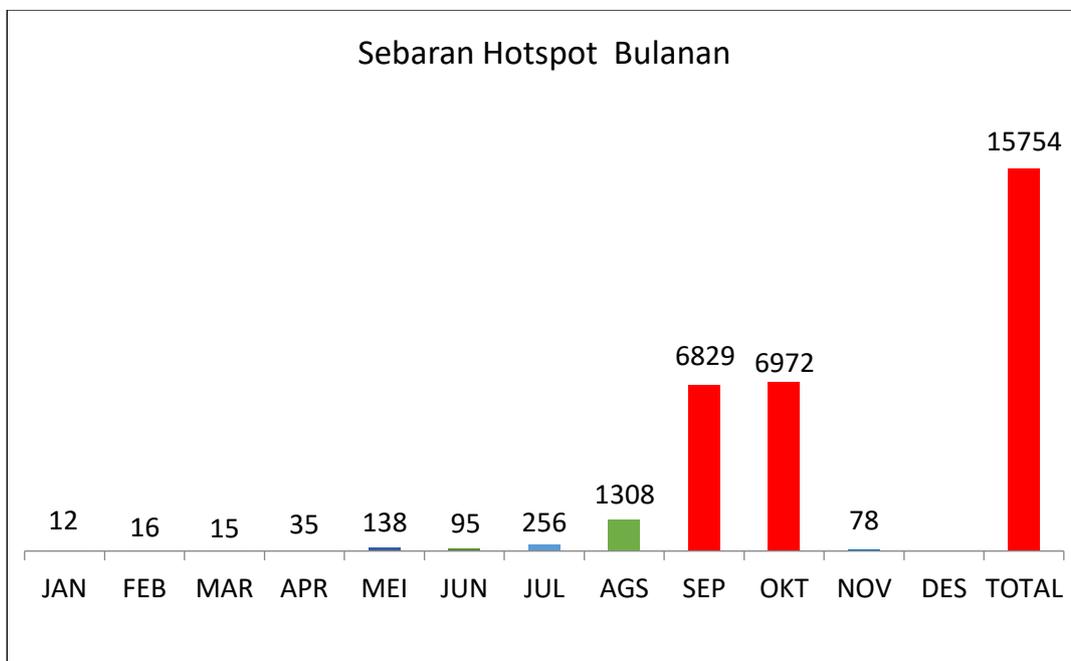
penelitian yang dilakukan, menyebutkan bahwa kebakaran hutan akibat aktivitas manusia sering kali menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Persoalan kebakaran hutan dan lahan dianggap lebih efektif diatasi dengan upaya memperkuat pencegahan daripada upaya penanganan/pengendalian seperti yang selama ini dilakukan. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mewajibkan upaya pencegahan kebakaran secara komprehensif, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, korporasi, dan pemerintah sebagai pengawas.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PERMASALAHAN DAN INFORMASI TERKINI TERKAIT DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari faktor alam (1%) (lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, musim kemarau, dan suhu panas) maupun faktor manusia (99%) (kelalaian, kebiasaan membersihkan ladang karena lebih mudah, murah, & cepat, atau kesengajaan karena ingin melakukan pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh individu atau korporasi).
2. Kondisi aktual kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu mulai mengalami penurunan signifikan (diiringi dengan turunnya hujan), khususnya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Muara Enim yang masih terdapat kebakaran, karena curah hujan yang belum merata dan intensitasnya yang masih ringan.
3. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih terpantau adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pantauan satelit sebagaimana dirilis melalui Web Asean Specialised Meteorological Centre (ASMC), namun secara visual sudah terasa cukup bersih. Jarak pandang SMB II mulai normal kembali, namun terkadang terjadi penurunan pada pagi hari karena kondisi kelembaban udara.

4. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Provinsi Sumatera Selatan, data *hotspot* sampai dengan bulan November 2019 sudah mengalami penurunan dengan jumlah sebaran dan per kabupaten/kota, diantaranya:



5. Dampak dari tingginya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatnya angka penderita ISPA. Pada bulan Juni 2019 angka penderita ISPA sebesar 39.683 orang, bulan Juli 2019 sebesar

40.874 orang, bulan Agustus 2019 sebesar 50.862 orang, dan bulan September 2019 meningkat menjadi 53.160 orang.

6. Berdasarkan Citra Satelit Sentinel, Landsat 8 OLI TIRS dan MODIS, sampai dengan 30 Oktober 2019 terdapat 361.857 Ha yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
7. **Upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain:** melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya karhutla, melaksanakan giat patroli di wilayah rawan karhutla, melaksanakan pemadaman darat & pemadaman udara (heli wb), pembuatan sekat bakar, melaksanakan pembasahan setelah giat water bombing, pembuatan sumur bor di sekitar lahan gambut yang terbakar, pembentukan tim PPRC tingkat Provinsi & Kabupaten, melaksanakan penegakan hukum (Gakkum), TMC, serta penebalan pers Satgas karhutla bentukan Pemda Sumatera Selatan.
8. **Permasalahan yang dialami selama di lapangan:**
 - Lokasi kebakaran luas dan tersebar pada beberapa lokasi, sulit dijangkau dan merupakan lahan gambut, terlebih kebakaran sering terjadi di malam hari
 - Titik hotspot yang terpantau melalui aplikasi LAPAN Fire hanya mengindikasikan titik panas bukan kebakaran kecuali dengan tingkat kepercayaan diatas 80%. Informasi yang diperoleh tidak diperoleh secara *real time* mengingat masih ada jeda waktu 3-4 jam sesuai perputaran satelit yang melintasi wilayah Indonesia untuk mengambil citra panas yang ada
 - Kondisi cuaca panas dan tiupan angin kencang
 - Terbatasnya sumber air dan tangki suplai air
 - Masih adanya kebiasaan masyarakat membuka lahan "sonor" secara diam-diam

- Masih ada lahan yang belum jelas statusnya dan tidak dikelola sehingga rawan karhutla
- Adanya kemungkinan masyarakat membakar sampah atau sengaja membuang puntung rokok yang sulit dikontrol.

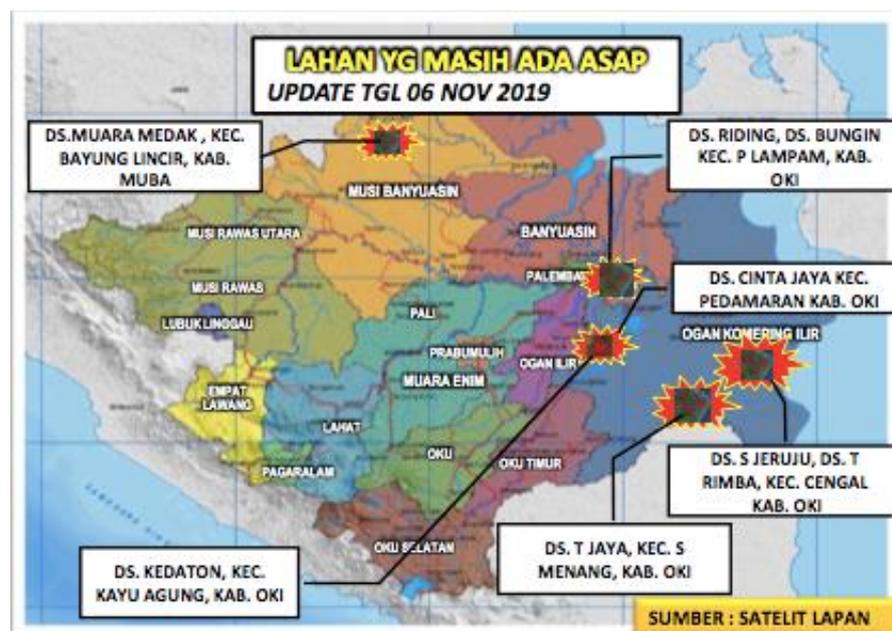
9. **Solusi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan adalah:**

- Pencegahan: perlunya sinkronisasi program antar lembaga/kementerian dalam pencegahan & penanggulangan karhutla, pembuatan sumur bor di lahan gambut secara *massive* pada saat musim kemarau, TMC dilaksanakan menjelang musim kemarau atau diawal musim kemarau untuk membasahi lahan gambut, giat sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan sepanjang tahun, da perlu adanya kurikulum pendidikan sekolah tentang materi karhutla agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak membakar.
- Pemadaman: kemudahan birokrasi bagi pilot asing dalam situasi bencana, Indonesia harus memiliki heli & pilot *water bombing* sendiri (militansi & nasionalisme tidak diragukan), memperbanyak & melengkapi peralatan pemadam kebakaran disetiap kabupaten/kota (mobil pemadam, mesin pompa, suntikan gambut, dan alat pemadam perorangan), serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap individu/korporasi pelaku pembakaran lahan.

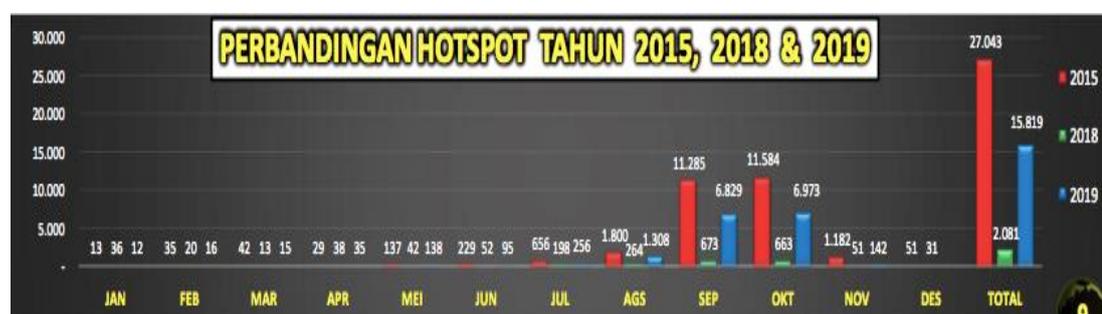
Lahan Gambut

1. **Permasalahan utama dalam ekosistem gambut secara Nasional adalah pengelolaan air /drainase yang buruk** sehingga mengakibatkan lahan gambut menjadi kering dan mudah mengalami kebakaran (berpengaruh pada peningkatan emisi karbon) atau mengakibatkan depresi lahan sehingga mudah mengalami bencana banjir

2. Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terluas kedua setelah Riau di Pulau Sumatera yaitu 1.270.421 Ha atau 16,3% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kebakaran hutan didominasi oleh lahan gambut (Oki merupakan daerah yang paling rawan dengan kebakaran)
3. Berdasarkan data terupdate, Lahan yang masih terdapat asap tersebar di Kabupaten Muba dan Kabupaten Oki (*update per tanggal 6 November 2019*).



3. Jika dilihat dari data yang dipaparkan oleh Satgas Gakkum, jumlah Hotspot Karhutla yang berada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 mendekati jumlah hotspot Karhutla tahun 2015, yaitu Tahun 2015 terdapat 27.043 hotspot sedangkan tahun 2018 terdapat 15.819 hotspot.



4. Kendala yang dialami Satgas Karhutla dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Terbatasnya personel satgas Karhutla dilihat dari luasan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga ***upaya yang dilakukan adalah melaksanakan patroli darat & udara***
- Perilaku masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar (sonor) sehingga ***upaya yang dilakukan oleh Satgas karhutla adalah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan***
- Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau oleh pasukan darat sehingga ***dilakukan kegiatan water bombing & TMC***
- Karakteristik lahan gambut menyebabkan api sulit dipadamkan secara tuntas sehingga Satgas ***melakukan pembasahan dengan penyiraman & membuat sumur bor***
- Musim kemarau yang panjang menyebabkan terbatasnya sumber air sehingga dibuatlah ***perbanyak sumur bor***
- Kondisi cuaca panas & angin yang kencang menyebabkan kebakaran mudah menyebar, Satgas telah ***membuat sekat bakar, kanal blocking & embung***
- Duk Heli WB 10 unit namun tidak semua heli WB beroperasi setiap harinya sehingga Satgas ***mengoperasionalkan sesuai dengan daerah karhutla yang menjadi skala prioritas***
- Terbatasnya peralatan pemadam kebakaran disetiap kabupaten dan kota, Satgas telah ***mendorong Pemda (kab/kota) untuk memperbanyak peralatan pemadam kebakaran***, serta
- Awal masuk musim penghujan tidak sesuai dengan prediksi dari BMKG, Satgas telah ***mengupayakan untuk memperpanjang waktu siaga tanggap darurat bencana asap di wilayah Sumatera Selatan.***

5. Evaluasi:

- pencegahan lebih penting daripada pemadaman tetapi harus tetap menyiapkan peralatan pemadaman yang memadai

- program pemberdayaan masyarakat oleh dinas-dinas provinsi maupun kabupaten terutama di desa rawan karhutla perlu dilaksanakan sebelum musim kemarau dan dengan giat yang nyata bukan hanya teori
- pencegahan dan penanggulangan karhutla harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat
- penerapan aturan yang ketat kepada pelaku usaha perkebunan dan kehutanan untuk memiliki peralatan standar pencegahan dan penanggulangan karhutla secara mandiri
- Gakkum yang cepat dan pemberian sanksi maksimal untuk efek jera bagi pelaku pembakaran, serta penentuan batas akhir status keadaan tanggap darurat bencana asap akibat karhutla diharapkan minimal 1 bulan setelah akhir musim kemarau berdasarkan prediksi BMKG.

B. PAPARAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki permasalahan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.
2. Kebakaran hutan dan lahan akan menjadi fokus program Pemerintah Provinsi di tahun mendatang
3. Pemerintah Provinsi berharap dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap sektor lainnya dan tidak berfokus kepada Kebakaran Hutan dan Lahan saja.
4. Perubahan RTRW daerah pesisir/zona pesisir sudah selesai ditingkat Kementerian dan menunggu pengesahan dari DPR RI
5. Meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI untuk mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang setiap tahunnya selalu terjadi di Provinsi Sumatera Selatan

6. Pemerintah Provinsi mengupayakan untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas dan terisolir khususnya di daerah yang memiliki lahan gambut yang besar dan di daerah perairan seperti OKI, Banyuasin, dan Muba
7. Pemerintah Provinsi sudah maksimal dalam menanggulangi kebakaran hutan, namun sebaran kebakaran sangat cepat dengan perbandingan 1: 200 titik api lainnya sehingga Satgas Karhutla tidak sanggup secara cepat memadamkan api
8. Anggaran Daerah tidak sanggup dalam membelikan peralatan *water bombing*, sehingga meminta dukungan dari Komisi IV dan Pemerintah Pusat dalam menyediakan peralatan tersebut.

C. PAPARAN SATGAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DANREM DAN POLDA)

SUBSATGASRATGAB

1. Daerah Ogan Ilir pada Tahun 2019, hotspot meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan Tahun 2015. Tahun 2015 hanya 226 titik api sedangkan untuk Tahun 2019 mencapai 643 titik api dengan *pos fire* hanya 56 titik kebakarannya.
2. Untuk Ogan Ilir, kasus karhutla Tahun 2018 dan 2019 terdapat kemiripan dan sudah mengajukan Pemerintah Provinsi untuk melakukan investigasi.
3. Sedangkan Ogan Komering Ilir, tekstur tanahnya gambut sehingga tidak mudah padam.

DANREM

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG, karakteristik dari tahun 2019 hampir mirip dengan Tahun 2015 sehingga jumlah kebakaran meningkat dibandingkan Tahun 2018

2. Satgas Karhutla ditempatkan di desa yang sangat rawan dengan luas 1 desa sebesar 73 ribu ha/ 15 Satgas Karhutla.
3. Satgas telah berupaya terus melaksanakan pemadaman, pendekatan, hingga modifikasi cuaca untuk memadamkan api di hutan dan lahan Sumatera Selatan
4. Berdasarkan data Giat Satgas Gakkum Sumatera Selatan Tahun 2019, terdapat 31 kasus Karhutla dan 40 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
5. Kabupaten Muba bisa menjadi contoh untuk penanggulangan Karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kabupaten Muba menggunakan dana desa untuk membeli alat berat sebagai alternatif masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan
6. Pemerintah Provinsi seharusnya memiliki standar untuk penanggulangan karhutla untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak mudah dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan
7. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan telah dilakukan secara maksimal.

POLDA/ POLRES

1. Selama bulan Agustus-November 2019, Polda telah mengungkap 31 laporan polisi dengan 30 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi yaitu PT HBL (Hutan Bumi Lestari). Dari 30 kasus tersebut, pengungkapannya dilakukan dengan cara tertangkap tangan selama kurun waktu 3 bulan dan pengungkapan tersangka korporasi dengan menggunakan teknik *Scientific Prime* (kejadian bulan Agustus dan ditangkap pada bulan September, saat ini sudah masuk tahap 1 dan diproses di kejaksaan).
2. Dari 31 kasus tersebut, 31 kasus sengaja melakukan pembakaran yang bertujuan untuk pembukaan lahan perorangan, pembukaan lahan

perusahaan (perkebunan, persawahan, dan pembangunan perumahan). secara teoritis dapat dibenarkan oleh tindakan penegakkan hukum.

3. Untuk barang bukti, kasus perorangan: korek api gas, ban yang dibakar, ember lapuk, selang, cangkul, dirigen berisi oli bekas, tali tambang, dll.
4. Penegakkan hukum secara teknis tidak mengalami permasalahan dan berjalan dengan lancar, namun penyidikan kasus dibutuhkan anggaran yang sangat besar dan diharapkan Polri diberikan dukungan anggaran penyidikan terkait dengan karhutla.

BNPB: Terkait dengan informasi yang *terupdate* terdapat 5 perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan (berasal dari Kejaksaan negeri Oki dan Okut), sisanya masuk dalam tahap penelitian berkas perkara.

Dinas Kehutanan: Pencegahan karhutla tetap diupayakan dan harga karet dan komoditi lain perlu diperhatikan karena dikhawatirkan permasalahan karhutla juga dipengaruhi oleh harga komoditi pertanian lainnya yang fluktuatif. Selain itu, pengelolaan lahan gambut yang harus dipikirkan.

D. ASPIRASI

1. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk pengadaan alat proteksi karhutla karena hanya memiliki 1 alat yang berada di pusat kota
2. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk alokasi anggaran pengadaan peta kelembaban lahan
3. Meminta dukungan anggaran Polri terkait dengan penyidikan karhutla
4. Meminta dukungan pengadaan peralatan *water bombing*
5. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk penyediaan mesin pemadaman api perorangan (pompa jinjing) bagi satgas Gakkum (khusus wilayah Ogan Ilir), serta program kanalisasi, pembuatan embung setiap 100 Ha yang didalamnya terdapat tower air maupun biopori (khusus wilayah Ogan Komering Ilir)

6. Diharapkan kedepan tidak ada Satgas Gakkum yang terdiri dari 15 dimana 10 orang merupakan TNI (satuan tempur) yang beresiko terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat yang dilakukan secara gotong royong (*Gotong Royong Padamkan Api*)
7. Meminta dukungan agar lahan gambut disekitar tol dapat dimanfaatkan untuk areal persawahan atau budidaya pertanian lainnya
8. Meminta dukungan perlengkapan pemadaman karhutla, mobil tangki, dan lainnya. Disamping itu, juga meminta binaan dan dukungan peningkatan kesejahteraan personel.

E. TANGGAPAN, PAPARAN, DAN USULAN DARI KOMISI IV DPR RI

1. Pembakaran hutan maupun lahan merupakan salah satu solusi yang paling efisien dan murah dalam membuka lahan. Masyarakat Sumatera Selatan berasumsi bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah bukan merupakan sebuah solusi sehingga ***Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat akan pembakaran hutan maupun lahan sehingga Karhutla di masa yang akan datang dapat diminimalkan seefisien mungkin.***
2. Di wilayah Musirawas utara kebakaran sudah hampir masuk kedalam pemukiman masyarakat sehingga ***Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas, tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang berkali-kali melakukan pembakaran di titik yang sama. Jika memungkinkan ijin usaha dicabut karena selama ini tidak menimbulkan sanksi jera terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan.***
3. ***Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di masa selanjutnya.***
4. ***Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk meningkatkan anggaran penanggulangan Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan***

5. *Perlu ada pendidikan perubahan budaya membakar lahan masyarakat lokal dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk menciptakan teknologi sederhana mungkin untuk mengganti teknik pembakaran lahan yang sering dilakukan oleh masyarakat lokal.*
6. *Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memperkuat koordinasi khususnya terkait dengan anggaran penanggulangan Karhutla*
7. *Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengadaan alat deteksi asap*
8. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pembakaran/kebakaran hutan dan lahan disekitarnya. Selain itu, jika ada korporasi/perusahaan yang terlibat diharapkan Pemerintah terbuka terkait dengan korporasi/perusahaan yang bermasalah tersebut.
9. Komisi IV DPR RI mendorong kepada Danrem untuk lebih fokus kepada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan
10. Komisi IV DPR RI memberikan rekomendasi agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Dinas Kehutanan memastikan semua perusahaan konsesi memiliki alat perlengkapan pencegahan kebakaran. Selain itu, perusahaan konsesi tersebut diberikan sanksi administrasi jika tidak memenuhi alat pencegahan kebakaran tersebut
11. *Komisi IV DPR RI merekomendasi kepada Pemerintah agar setiap 1 ha terdapat 10 pemuda yang direkrut untuk memberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam menjaga keamanan hutan dan lahan, agar dapat mengurangi karhutla yang sering terjadi setiap tahunnya.*

F. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat akan pembakaran hutan maupun lahan sehingga Karhutla di masa yang akan datang dapat diminimalkan seefisien mungkin
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas, tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang berkali-kali melakukan pembakaran di titik yang sama
3. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk bertindak tegas dalam mencabut ijin usaha perusahaan jika terjadi pelanggaran kembali
4. Komisi IV DPR RI merekomendasi kepada Pemerintah agar setiap 1 ha terdapat 10 pemuda yang direkrut untuk memberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam menjaga keamanan hutan dan lahan, agar dapat mengurangi karhutla yang sering terjadi setiap tahunnya

III. PENUTUP

Demikian laporan yang diperoleh selama Kunjungan Spesifik terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh beberapa pihak, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut. Semoga kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kedaulatan Negara dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 10 November 2019

Wakil Ketua/Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi IV DPR RI,

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si

A-375

LAMPIRAN MITRA KERJA

- 1. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan : Ir. H. Mawardi Yahya**
- 2. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Drs. M.R. KARLIANSYAH, M.Sc**
- 3. Sekretaris Badan Restorasi Gambut : Ir. Hartono M.Sc.**
- 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan : Pandji Tjahjanto**

LAMPIRAN MEDIA CETAK

KLHK-Komisi IV DPR Kunker ke Bekas Karhutla di Sumsel, Jambi, Riau, dan Kalteng

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Usai rapat kerja (Raker) perdana pada Selasa lalu (5/11/2019), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI tancap gas dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Kamis (7/11/2019).

Mereka berkunjung ke beberapa provinsi yakni ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, lalu desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kemudian ke Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke tempat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi.

Pada Kunker ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR yang dipimpin oleh wakil Ketua Hasan Aminudin (FNasdem).

Pada Kunker ini, KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur, Satgas Karhutla, dan Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir, Komisi IV DPR RI lebih banyak menggali berbagai kendala dan hambatan yang ditemui oleh satgas karhutla di lapangan.

Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespon dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan.

Di di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (7/11), Komisi IV DPR mengapresiasi Komitmen KLHK dalam Penegakan Hukum Karhutla.

Kunker Komisi IV DPR RI kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra) dan didampingi langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Bupati Kampar.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para Manggala Agni dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta komitmen KLHK dalam upaya penegakan hukum. Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Bentuk Relawan Pencegah Api

Dalam Kunker ke Kalteng, pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Hudoyo mendampingi Komisi IV DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dedi Mulyadi (FPG) dalam rangka peninjauan areal bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Kamis (7/11).

Dalam dialog dengan masyarakat peduli api, Komisi IV DPR RI akan mendorong pemerintah untuk membentuk relawan pencegah api agar kejadian Karhutla dapat diminimalisir.

Pada Kunker kali ini juga, Komisi IV DPR RI mengobservasi tanaman usia 3-4 tahun. Sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang sangat antusias, KLHK akan membangun 1.000 Kebun Bibit Desa agar lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit, serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan dalam Kunker di Jambi, Kamis, Komisi IV mengapresiasi upaya pengendalian Karhutla di Jambi.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mendampingi Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Sudin (FPDIP), bersama Unsur Muspida Prov. Jambi, Badan Restorasi Gambut, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan unsur Satgas Karhutla Jambi.

Komisi IV DPR RI berkunjung ke Markas Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni Kota Jambi dan melakukan diskusi lapangan terkait sumberdaya pengendalian karhutla.

Pengendalian karhutla menurut Komisi IV DPR RI menekankan pada upaya pencegahan. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya maksimal semua pihak yang telah melakukan upaya pengendalian Karhutla.

Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/07/klhk-komisi-iv-dpr-kunker-ke-bekas-karhutla-di-sumsel-jambi-riau-dan-kalteng>.

Sumber lainnya:

1. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26390/t/Lahan+Gambut+Sumsel+Banjaya+Terbakar>
2. https://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2050
3. <http://detak-palembang.com/2019/11/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-upaya-pemprov-sumsel-tekan-karhutla/>

4. <https://poskotanews.com/2019/11/08/komisi-iv-dpr-dan-klhk-tinjau-bekas-karhutla-di-empat-provinsi/>
5. <https://www.tagar.id/dpr-ri-apresiasi-pemprov-sumsel-tekan-karhutla>
6. <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/415715/dpr-ri-apresiasi-pemprov-sumsel-atasi-karhutla>
7. <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/08/337/2127358/klhk-dan-komisi-iv-dpr-tinjau-lokasi-karhutla-di-4-provinsi>
8. <https://radarmalang.id/klhk-komisi-iv-dpr-mengunjungi-empat-provinsi-terdampak-karhutla/>

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kantor Gubernur



Lokasi Kebakaran Hutan



Posko Tim Satgas Kebakaran Hutan

